PENGARUH KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
(Studi Pemilihan Kepala Desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung tahun 2013)

(Skripsi)

Oleh
Rendi Noverdi

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK (Studi Pemilihan Kepala Desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung tahun 2013)

Oleh:

Rendi Noverdi

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kesadaran politik terhadap terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Negeri Sakti pada Pilkades 2013. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan cara survei. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa Negeri Sakti. Sementara populasi penduduk desa Negeri Sakti dalam penelitian ini sebanyak 2119 mata pilih dengan sampel sebanyak 100 mata pilih dan taraf nyata penelitian ini sebesar 0,5%. Hasil analisis regresi sederhana dengan satu prediktor menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,421 dengan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,177, hasil menunjukkan hubungan yang nyata antara kesadaran politik (X) sebesar 17.7 % dan partisipasi politik (Y) sebesar 32,5 %. Berdasarkan kenyataan dalam penelitian menunjukkan bahwa kesadaran politik sebesar 64 % pada kesadaran politik berkorelasi dengan partisipasi politik sebesar 59 %. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi pada masyarakat desa Negeri Sakti kecamatan Gedong Tataan, kabupaten Pesawaran.

Kata Kunci: *Kesadaran Politik, Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Desa*.

ABSTRACT

EFFECT OF POLITICAL CONSCIOUSNESS ON POLITICAL PARTICIPATION (Study of Village Head Election in the village Negeri Sakti sub-district Gedong Tataan, district Pesawaran Province Lampung in 2013)

By

Rendi Noverdi

This research aims to explain the influence of political awareness on the political participation of the village Negeri Sakti at Pilkades 2013. This study uses quantitative research by means of surveys. The hypothesis in this research is that there is influence of political participation in village head election of Negeri Sakti. While the population of villagers Negeri Sakti in this study as many as 2119 eyes selected with a sample of 100 eye select and the real level of this study of 0.5%. The result of simple regression analysis with one predictor showed the correlation coefficient (r) of 0.421 with the coefficient of determination (r^2) of 0.177, the results show a real relationship between political awareness (X) of 17.7% and political participation (Y) of 32.5%. Based on the fact in the research shows that political awareness of 64% on political awareness correlates with political participation by 59%. This shows the public awareness in democratizing the village Negeri Sakti, sub-distric Gedong Tataan, Distric Pesawaran.

Keywords: Political Awareness, Political Participation, Village Head Election.

PENGARUH KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
(Studi Pemilihan Kepala Desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung tahun 2013)

Oleh

Rendi Noverdi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi	:	**PENGARUH KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK (Studi Pemilihan Kepala Desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung tahun 2013)**
Nama Mahasiswa	:	Rendi Noverdi
Nomor Pokok Mahasiswa	:	1216021095
Jurusan	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.** .....

Penguji : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya, M.Si.
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 Februari 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali oleh Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Februari 2018

Yang membuat pernyataan

Rendi Noverdi
NPM. 1216021095

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan Bandar Lampung, 6 November 1993, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Rafiuddin (Alm) dan Ibu Misroni.

Jenjang pendidikan

- Sekolah Dasar Negeri 2 Negeri Sakti kabupaten Lampung Selatan lulus pada tahun 2006
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2009
- Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012

MOTTO

Anda harus percaya pada sesuatu, keberanian takdir, kehidupan, karma atau apa saja. Percaya bahwa titik-titik tersebut akan berhubungan satu sama lain dan memberi Anda keyakinan untuk mengikuti kata hati. Meskipun hal itu akan membawa Anda ke jalur yang berbeda dari jalur yang banyak dilalui orang, dan itulah yang akan membuat sebuah perbedaan besar.

(Steve Jobs)

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta shalawat kepada-Mu robbi terbaik Rasulullah Muhammad Shalallahu'alaihi Wasallam, dengan segenap cinta dan segala kerendahan hati kupersembahkan karya pertama ini kepada :

1. Seluruh keluarga besar yang menanti–nanti kelulusan
2. Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWTyang telah melimpahkan anugerah Nya, karena atas ridha dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi. sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini adalah karena bantuan dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Syarief Makhya., M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
2. Drs. Deden Kurnia Drajat., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FISIP Universitas Lampung.
3. Drs. R. Sigit Krisbintoro., M.Ip. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Seluruh Jajaran Dosen Pengajar, Ibu Feni, Ibu Dwi Wahyu, Pak Denden, Pak Sigit, Pak Budi Harjo, Pak Piping, Pak Budi Kurniawan, Pak Syafar, Pak Robi, Pak Wondo, Pak Himawan, Pak Ariska, Pak Darma, dan Pak Andri Marta serta dosen-dosen lain, terimakasih atas wawasan ilmu yang diberikan, mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan;.
5. Drs. Hertanto., M.Si., Ph.D., selaku dosen pembimbing Skripsi.
6. Dr. Ari Darmastuti., M.A.,.selaku dosen pembahas dan penguji.
7. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, Ibu Rianti dan staf FISIP Universitas Lampung tidak dapat ditulis satu persatu, terimakasih telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di jurusan Ilmu Pemerintahan.

8. Bapak Lurah Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan , bimbingan, dan dukungan yang diberikan mendapat balasan ridho Allah SWT, limpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta berkenan membalas semua budi yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 26 Februari 2018
Penulis,

Rendi Noverdi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 16
C. Tujuan Penelitian 17
D. Kegunaan Penelitian 18

II.TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Kesadaran Politik 19
1. Definisi Kesadaran Politik 19
2. Unsur-Unsur Kesadaran Politik 20
3. Cara-Cara Untuk Mencapai Kesadaran Pilitik 20
4. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesadaran Politik 21
5. Indikator Kesadaran Politik 21

B. Konsep Partisipasi Politik 23
1. Definisi Partai Politik 23
2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 25
3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik 28

C. Hubungan Kesadaran Politik dan Partisipasi Pilitik 33
D. Kerangka Pikir 35
E. Hipotesis 37

III. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 39
B. Definisi Konseptual 40
C. Definisi Operasional 43
D. Lokasi Penelitian 44
E. Populasi dan Sampel 44
F. Jenis Data 46
G. Teknik Pengumpulan Data 48
H. Teknik Pengolahan Data 48
I. Teknik Penentuan Skor 49

J. Teknik Uji Hipotesis 50

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Negeri Sakti 52

B. Sejarah Berdirinya Desa Negeri Sakti..... 55

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Politik Masyarakat Desa Negeri Sakti 65

B. Partisipasi Politik Masyarakat Desa Negeri Sakti..... 75

C. Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Negeri Sakti..... 77

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 79

B. Saran..... 80

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel halaman

1. Indeks perbedaan partisipasi masyarakat dalam pemahaman hak sipil dan politik 6
2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tatataan kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung Tahun2015 11
3. Refrensi Penelitian Terdahulu 12
4. Beberapa Definisi Partisipasi politik 31
5. Variabel dan Indikator 43
6. Sebaran Penduduk dan yang Mempunyai Hak Pilih 45
7. Sebaran penduduk dan keadaan penduduk di desa Negeri Sakti sampai dengan tahun 2016/2017 52
8. Sebaran penduduk berdasarkan golongan usia sampai dengan tahun 2016/2017 52
9. Sebaran tingkat pendidikan sampai dengan tahun 2016/2017 52
10. Mata pencaharian masyarakat desa Negeri Sakti 53
11. Pendapatan Riil Masyarakat desa Negeri Sakti 53
12. Pemangku jabatan yang pernah memimpin desa Negeri Sakti sampai dengan saat ini 54
13. Jumlah Penduduk Desa Negeri Sakti 56
14. Kepala Dusun dan Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Tetangga 57
15. Mata Pencaharian Penduduk Desa Negeri Sakti 57
16. Pola Penggunaan Tanah Desa Negeri Sakti 58
17. Data Kepemilikan Ternak Desa Negeri Sakti 58
18. Sarana dan Prasarana yang dimiliki desa Negeri Sakti 59
19. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Negeri Sakti 59

20. Data Pemilih dan Aktifitas Penduduk dalam Pemilihan Kepala Desa Negeri Sakti Tahun 2014 60
21. Partisipasi Masyarakat Kabupaten Pesawaran Dalam Pilkada Tahun 2015 60
22. Pemilihan Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 61
23. Distribusi Data Variabel Kesadaran Politik 65
24. Distribusi Data Variabel Partisipasi Politik 68
25. Uji Linieritas 70
26. Hasil Pengujian Hipotesis 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar halaman

1. Bagan Kerangka Pikir 37
2. Histogram DPT kabupaten Pesawaran..... 61
3. Histogran Pilkada kabupaten Pesawaran 62
4. Histogram Distribusi Frekuensi Kesadaran Politik..... 67
5. Histogram Distribusi Frekuensi Partisipasi Politik..... 69

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar negara-negara di dunia menamakan dirinya negara demokrasi. Bahkan negara yang tidak menjalankan prinsip–prinsip demokrasi apabila negaranya disebut sebagai negara yang tidak demokratis. Hal ini membuktikan bahwa paham demokrasi sudah menjadi paham yang dianut oleh negara-negara di dunia. Indonesia juga adalah negara yang bentuk tata pemerintahannya demokrasi seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kehidupan yang demokratis seakan–akan menjadi sosok idola dalam masyarakat, khususnya semenjak digulirkannya gerakan reformasi oleh masyarakat bersama mahasiswa.

Demokrasi dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi rakyat memberikan kesempatan yang sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga demokrasi merupakan suatu proses dimana semua warga negara berhak dan mempunyai kesetaraan yang sama dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah mereka. Menurut Abdulkarim (2007: 15), pemerintah yang berpegang pada demokrasi merupakan pemerintah yang dipegang oleh rakyat atau setidak-tidaknya

diikutsertakan dalam pembuatan suatu keputusan politik, pemerintahan atau kenegaraan.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Partisipasi politik memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokratisasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini.

Indonesia dalam berpartisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang–Undang” dan diatur secara jelas dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak–hak sipil dan politik, di mana poin - poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain - lain.

Hak sipil dan politik merupakan salah satu hak dasar warga negara dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan warga, dengan alasan apapun tidak bisa menghilangkan hak sipil dan politik warga negara. Apalagi bersangkutan dengan persoalan mekanisme atau prosedur demokrasi. Selain itu, hak sipil dan politik warga negara merupakan bagian hak konstitusi yang harus di laksanakan, tanpa

kecuali. Hak - hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Hak sipil dan politik merupakan hak yang dimiliki warga negara ketika berhadapan dengan entitas negara yang memiliki kedaulatan. Hak-hak yang dimiliki warga negara sebagai warga sipil dalam sebuah negara, dan juga hak politik warga, yang memiliki kedudukan yang sama dalam pandangan negara, tidak ada diskriminasi dan sebagainya dalam kedudukannya sebagai warga negara maupun sebagai subjek hukum. Vierdag mengkategorikan hak sipil politik ini sebagai hak negative *(negative right),* karena untuk merealisasi-kannya negara harus diam, tidak melakukan tindakan *(pasif),* sehingga perumusannya menggunakan *freedom from* (bebas dari).

TAP MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan Pembukaan UUD Tahun 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights* serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

> “Menurut M.El Mahtaj (2008: 45) menuliskan: HAM dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat, demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan, peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Perlindungan dan pemenuhan HAM

> melalui rezim yang demokratik berpotensi besar mewujudkan kesejahteraan rakyat.”

Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3).56 Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945.57 Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama.

Konkritisasi dari ketentuan–ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya, sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang tentang peraturan perundang–undangan di Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang secara nyata memberikan pengakuan terhadap hak–hak warga negara yaitu: (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada point (h) secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih.

Hak sipil dan politik yang paling mendasar adalah hak kebebasan untuk berpikir dan berkeyakinan, tanpa adanya intervensi dari siapapun, sekalipun itu otoritas negara. Maka inilah yang disebut sebagai *freedom of religion and believe* (hak kebebasan atas agama dan kepercayaan). Terkait pula dengan hak–hak sipil dan politik adalah hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, dan hak untuk tidak dibunuh atau disiksa. Ini disebut pula sebagai hak dasar, atau *non-derogable rights* yang artinya hak-hak dasar manusia yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dicabut dalam situasi apapun. Baik itu dalam keadaan perang, maupun dalam situasi darurat, negara harus tetap melindunginya.

Dengan diberlakukannya Undang–Undang (UU) baru Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai pengganti Undang–Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, maka pilkada langsung dapat dilaksanakan karena payung hukum bagi sistem pilkada langsung secara legal formal telah dibuat.

Berdasarkan undang–undang tersebut, semakin jelas bahwa proses transisi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia sejak reformasi 1998 cukup menemukan jalan terang guna membangun kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan yang lebih baik. Begitu juga halnya dengan berbagai proses pilkada di berbagai daerah di Indonesia yang selama ini telah berlangsung.

Sementara hasil penelitian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung terkait dengan hak sipil dan politik di Lampung di jabarkan oleh kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, ibu Yeane Irmaningrum pada saat

ekspose di kantor BPS pada tahun 2016 menunjukkan, terdapat dua indikator yang sama-sama memiliki skor 100, baik itu tahun 2014 maupun 2015. Keduanya, kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU daerah dalam penyelenggaraan pemilu, serta indikator kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. "Tingkat demokrasi pada aspek pemilu yang bebas dan adil indeksnya di atas 80, sehingga kategorinya baik,"

Menurutnya, penurunan nilai IDI periode 2014 - 2015 dipengaruhi perubahan tiga aspek, tergambar seperti table di bawah ini:

Tabel 1: Indeks perbedaan partisipasi masyarakat dalam pemahaman hak sipil dan politiknya

Aspek	Tahun pengamatan		Perbedaan
	2014	2015	
Kebebasan sipil (*civil liberty*)	72,06	71,99	0,07
Hak-hak politik (*political rights*)	63,69	63,19	0,5
Lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*)	83,66	62,74	20,92

Sumber:Pengolahan data

> ."Perubahan dua indikator yang digunakan dalam penghitungan IDI 2015 dari aspek lembaga-lembaga demokrasi menyumbang penurunan IDI yang cukup signifikan. Tapi, secara umum, dari 28 indikator rata-rata bunyinya negatif. Hanya 13 indikator yang mencapai kinerja kategori baik," (IDI, 2016, ruajurai.com).

Berdasarkan kajian tersebut maka penulis mencoba memahami kebenaran dengan meninjau pada pemilihan kepala desa di desa Negeri Sakti, kecamatan Gedong Tataan, kabupaten Pesawaran propinsi Lampung. Pada pemilihan kepala desa tersebut, keterlibatan masyarakat sangat aktif hingga pembentukan badan–badan di bawah kepala desa seperti Sekretaris

Desa/Kaur Pemerintahan, BPD (Badan Permusyawarata Desa) dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyaarakat).

Disadari bahwa pemilu terkecil dalam suatu daerah adalah pedesaan yaitu Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa, pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa.

Pemilihan kepala desa adalah sarana pelaksanaan azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa harus dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Sifat demokratis harus ada dan dipertahankan, bukan semata-mata, karena sendi-sendi kehidupan demokratis dapat menjamin terselenggaranya pembangunan desa, akan tetapi pembangunan desa memerlukan dukungan dari masyarakat.

Desa merupakan sosok pemerintahan lokal yang memiliki beragam identitas. Berbagai unsur kehidupan berawal dari desa yang keberadaanya sudah ada dari sebelum bangsa ini merdeka. Desa sebagai salah satu bagian suatu negara memiliki karateristik yang sama sebagai salah satu lingkungan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Keadaan ini secara nyata memberikan pengaruh besar tata kehidupan desa terutama dalam menciptakan stabilitas diberbagai bidang. Dinamika struktural ini memberikan bukti bahwa aktifitas sistem pengelolaan

tata pemerintah desa memiliki kompleksitas penting. Lagi pula desa sebagai struktural terkecil sekaligus ujung tombak pemerintahan negara. Desa memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dalam mengahadapi isu dan gejolak sosial yang timbul.

Desa menjadi bagian tema penting dalam membahas soal demokrasi lokal. Sejak reformasi politik berlangsung di Indonesia, inisiatif untuk melakukan pembaruan desa terus bermunculan. Arahnya adalah mendorong agar praktik demokratisasi dilangsungkan, serta menuju kemandirian dan kesejahteraan warga desa. Pesan mulia itu memang tidak mudah diwujudkan, dimana tarik menarik kepentingan elit politik dan ekonomi selalu saja mewarnai bahkan menghadang perjuangan komunitas warga pinggiran ini didalam mewujud-kan cita–citanya mempengaruhi arus perubahan.

> "Menurut Soekanto (1982: 125) terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan)".

Hal yang terjadi kemudian adalah adaya beberapa pergeseran signifikan; *pertama*, berkurangnya dominasi birokrasi, digantikan oleh peran institusi-institusi masyarakat lokal, seperti adat misalnya. Makin tumbuh keberadaan forum-forum kewargaan di desa sebagai bagian dari *social capital* yang didalamnya berkembang nilai–nilai partisipasi secara otentik. *Kedua*, semangat daptasi atas demokrasi *delegatif–liberatif* cukup besar yang termaktub melalui regulasi baru ini. Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD atau Baperdes), yang bertindak sebagai badan legislatif baru di desa sangat

bermakna menjadi institusi demokrasi. *Ketiga*, adalah semangat partisipasi masyarakat sangat dikedepankan. Proses politik, pemerintahan dan pem–bangunan di desa tidak lagi terbangun dalam bingkai kebijakan pemerintah pusat secara komando *(top-down),* melainkan berasal dari partisipasi masyarakat *(bottom-up).*

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) didukung oleh dorongan keterbukaan informasi publik semakin menguatkan pendekatan baru sebagai antithesis dari pendekatan program pembangunan pemerintah. Saat ini sedang marak dibicarakan adanya konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa "membangun desa" dan "desa membangun" meskipun keduanya tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Dari konsep kunci pembangunan dapat kita turunkan lagi menjadi pembangunan perdesaan *(rural development)* dan pembangunan desa *(village development).* Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri.

Berdasarkan undang undang nomor 6 tahun 2014 tantang desa dapat dijelaskan bahwa: Ruang lingkup Hak Desa yang diatur dalam pasal ini berkaitan dengan : (1) hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul; (2) menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan (3) mendapatkan sumber pendapatan.

Kewajiban yang diatur dalam pasal ini adalah : (1) kewajiban desa untuk menjaga kerukunan; (2) persatuan dan kesatuan masyarakat desa dalam kerangka NKRI; (3) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; (4) mengembangkan kehidupan demokrasi; (5) pemberdayaan masyarakat, dan (6) memberikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat

Implementasi atas hak dan kewajiban yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Desa, sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat. Hak dan kewajiban desa harus mengutamakan pemenuhan hak dari masyarakat. Disisi lain kewajiban masyarakat harus mampu mendukung dan menopang kemajuan desa.

Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan dembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil, berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berhak untuk memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa atau anggota lembaga kemasyarakatan desa. Selain itu masyarakat desa pun berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.

Masyarakat berkewajiban membangun diri dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik, berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa, berkewajiban untuk memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa dan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

Desa Negeri Sakti, kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran adalah desa yang dibentuk sejak tahun 1880, merupakan desa yang dibuka pada jaman colonial Belanda. Desa ini pada mulanya dibuka oleh masyarakat trasmigrasi dari pulau jawa. Dengan wilayah seluas 1.327,04 HA dan disebut desa swasembada, desa Negeri Sakti dengan tingkat pendidikan masyarakat seperti table berikut ini:

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tatataan kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung tahun 2015.

No	Tingkat Pendidikan	Banyak	Keterangan
1	Taman kanak-kanak	150 orang	
2	Sekolah Dasar/Sederajat	200 orang	
3	SMP/ Sederajat	250 orang	
4	SMA/Sederajat	100 orang	
5	Akademi/D1-D3	35 orang	
6	Sarjana S1	40 orang	
7	Sarjana S2	7 orang	
Jumlah		782 orang	

Sumber: Data pokok desa/kelurahan Negeri Sakti tahun 2015

Berdasadrkan table 2 di atas masyarakat desa Negeri Sakti merupakan masyarakat dengan rata-rata tingkat pendidikan cukup baik, dalam arti mempunyai kemampuan baca tulis yang memadai. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat desa Negeri Sakti memahami peran dan haknya sebagai masyarakat yang mempunyai hak sipil dan dan politik dalam memajukan daerahnya dalam berbagai bidang.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Pengalaman pemilihan kepala desa yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. Sebagai fenomena penggambaran di atas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran politik dan kepercayaan sangat rendah maka partisipasi politik manjadi pasif dan apatis.

Tabel 3. Refrensi Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
Rahmanto (2012)	Partisipasi Masyarakat Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam	Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu: Metode Pengumpulan data, Penggalian data,dan	Kasus-kasus yang dianalisa adalah yang dianggap mampu mewakili penjelasan partisipasi masyarakat dalam

	Pemilihan Kepala Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur	metode pengamatan. Dokumen yang digunakan untuk memperoleh data tekstual tentang fenomena atau kejadian yang telah berlalu, antara lain: Dokumen tentang pilihan Kepala Desa Talun 2012	pilihan Kepala Desa 2012 di Desa Talun. Temuan penelitian bahwa partisipasi masyarakat pemilih dipengaruhin tiga faktor yaitu : figur, uang, dan tim sukses.
Theofilus Kuhon (2012)	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Suatu Studi di Desa Tonsealama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa	Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah: Apakah yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat desa Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara dalam proses pemilihan kepala desa? Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang ingin mendapat gambaran secara utuh rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan kepala desa.	Hal yang menarik adalah bahwa alasan mereka untuk tidak aktif dalam pilkades di Tonsealama pada umumnya bahwa sudah ada lembaga yang mengurus masalah pilkades tersebut, ada juga alasan bahwa masalah pilkades di Tohsealama ini menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Artinya ketika informan tidak terlibat secara aktif dalam pemilihan kepala desa, informan beranggapan ada bagian masyarakat lain yang sudah mengurusi kegiatan tersebut, dan mengganggap sudah gugur tanggung jawabnya. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih adalah faktor sosial ekonomi, faktor psikologis,

			kepercayaan politik, dan sistem politik.
Moh. Ainul Yakin (2013)	Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013	Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan variabel adalah partisipasi politik. Populasi yang dipilih dalam penelitian tersebut adalah keseluruhan pemilih di Desa Lembung sejumlah 982 pemilih dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 pemilih (10%) dan menggunakan metode pengumpulan data berupa angket, wawancara dan observasi.	Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu pemilihan kepala desa di Desa Lembung tingkat partisipasi masyarakat tergolong dalam partisipasi aktif, karena kesadaran politik kepada pemerintah sangat tinggi dalam memberikan dukungan melalui pemilihan kepala desa. Tingkat partisipasi masyarakat desa Lembung dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2013 sangat tinggi yaitu 98,2% masyarakat telah menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan kepala desa. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Lembung karena adanya agen-agen sosialisasi politik dalam pelaksanaan tersebut sehingga kesadaran dalam memilih calon kepala desa sangat tinggi karena masyarakat ingin mencari sosok

			pemimpin demi perubahan-perubahan yang baik.

Sumber: Data Diolah oleh peneliti tahun 2017.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada pengaruh kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan kepala desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, sehingga mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran akan hak sipil dan politik masyarakat di Desa Negeri Sakti terhadap hak sipil mereka dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa tahun 2015. Kesadaran politik masyarakat dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman yang ada di tengah–tengah masyarakat terhadap pemilihan kepala desa. Selain itu dapat dilihat juga dari sikap dan tindakan politik yang ditunjukkan oleh masyarakat pada pilkades tahun 2015.

> Menurut Budiardjo (2008: 369) menyatakan bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemilihan kepala desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung menunjukkan partisipasi yang cukup signifikan terhadap kesadaran terhadap hak sipil dan politik di masyarakat desa Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengaruh kesadaran sipil dan politik terhadap partisipasi masyarakat dalam politik pemilihan kepala desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung. Kesadaran sebagai warga masyarakat atas perkembangan dan kemajuan desa meraka dengan terpilihnya kepala desa yang baru, nantinya.

B. Rumusan Masalah

Alasan pemilihan Desa Negeri Sakti menjadi fokus studi kasus bagaimana penguatan masyarakat sipil dalam pemahamannya dengan politik adalah menginisiasi kemandirian desa tidak terlepas dari keberadaan Desa Negeri Sakti sebagai salah satu desa penggagas berdirinya masyarakat sipil madani. Pada awalnya, desa ini merupakan salah satu desa yang cukup baik dalam menata wilayahnya dan merupakan salh satu desa dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi secara rata-ratanya di kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran propinsi Lampung.

Melalui masyarakat madani, Desa Negeri Sakti terus meningkatkan peran desa dalam mempergunakan sarana moderen sebagai bagian untuk mengembangkan dan member pemahaman tentang desa, dimana selama ini berita tentang desa di media arus utama masih sangat sedikit. Disamping itu kesadaran masyarakat desa Negeri Sakti ini terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki data yang akurat dan *up to date*, diantaranya sebagai bagian dari upaya mengangkat potensi desa dan mencatat kegiatan desa yang suatu saat akan menjadi sejarah tentang

perkembangan di sebuah desa. Selain itu, hal penting lainnya adalah bagaimana menjalankan dan melaksanakan keterbukaan informasi publik yang terus dituntut masyarakat agar kerja-kerja pemerintah desa terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah pokok : "Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran."

Rumusan masalah pokok tersebut akan dijawab melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesadaran politik masyarakat?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa Negeri Sakti dalam pemilihan kepala desanya?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran politik masyarakat desa Negeri Sakti terhadap partisipasi dalam pemilihan kepala desa (pilkades) untuk kepentingan mereka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sabagai berikut :

1. Mengindetifikasi tingkat kesadaran politik masyarakat desa Negeri Sakti.
2. Menganalisis tingkat partisipasi dalam pilkades.
3. Menganalisis hubungan/pengaruh kesadaran politik masyarakat desa Negeri Sakti terhadap partisipasi pilkades.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dan memiliki minat terhadap kajian tentang gerakan sosial hak sipil dan politik masyarakat dalam konteks *civil society* dan pemberdayaan masyarakat, lebih khususnya kepada :

1. Manfaat akademik dan teoritis

   Turut mengembangkan teori–teori ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan khususnya pada pemerintahan desa, selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan padjurusan Ilmu Pemerintahan. Selain itu diharapkan juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dikemudian hari.

2. Manfaat Implementatif dan Regulatif

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan pada penelitian lain dengan harapan agar masyarakat menyadari hak–haknya dalam kehidupan berpolitik khususnya dalam pilkades di desanya. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi regulasi untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan demi kemajuan dalam keilmuan pada jurusan Ilmu Pemerintahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kesadaran Politik

1. Definisi Kesadaran Politik

> Menurut Naning (1982: 64) kesadaran adalah suatu kondisi psikologis yang tanggap terhadap sesuatu hal, sedangkan politik adalah segala hal ikhwal tentang negara. Jadi kesadaran politik adalah berarti suatu kondisi psikologis yang tanggap terhadap segala hal ikhwal negara. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik berarti tanggap terhadap segala hal ikhwal kenegaraan.
>
> Menurut Ruslan (2000: 94) kesadaran politik merupakan berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik.
>
> Budiardjo (1985: 22) mengatakan bahwa tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.
>
> Selanjutnya menurut Budiyanto (2006: 185), kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan *urgensi* urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran politik atau keinsyafan hidup bernegara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang terbengkalai.

Berdasarkan beberapa pengertian kesadaran politik dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya untuk dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapinya.

2. Unsur-unsur Kesadaran Politik

Menurut Ruslan (2000: 417) di dalam kesadaran politik mencakup unsur-unsur yang meliputi antaranya yaitu:

a. Kesadaran islam yaitu tentang konsepsi secara benar dan menyeluruh yang dengannya seorang individu mampu menyikapi realita yang terjadi dengan segala aspek-aspeknya sesuai pandangan intelektual yang telah terbentuk pada dirinya. Dalam hal ini kesadaran didasarkan pada pandangan hidup seseorang dengan kata lain sesuai dengan keyakinan setiap orang. Jadi, pada dasarnya kesadaran islam dalam pengertian ini yaitu kesadaran dalam konsep islam, namun demikian bukan berarti seseorang selain agama islam tidak berarti tidak memiliki kesadaran politik, karena hal tersebut didasarkan pada keyakinan pandangan hidup masing-masing.

b. Kesadaran gerakan yaitu kesadaran untuk membentuk organisasi atau gerakan yang bekerja guna mewujudkan cita-cita bersama, tergabung dan terlibat di sana dengan berupaya memberikan kontribusi maksimal bagi perkembangan organisasi atau gerakan tersebut.

c. Kesadaran akan problematika politik yang terjadi di masyarakatnya, meliputi kesadaran akan masalah, hukum islam, kebebasan dan keterjajahan, kebebasan politik, masalah persatuan dan sebagainya.

d. Kesadaran akan hakikat sikap politik yaitu kesadaran akan substansi sekitar sikap politik dimana individu menjadi sadar akan peristiwa atau masalah politik itu sendiri. Termasuk di antaranya adalah memelajari masalah-masalah politik umum, memelajari arus politik dan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dan menentukan sikap terhadapnya, dan memonitor peristiwa-peristiwa politik yang sedang berkembang.

3. Cara-Cara Untuk Mencapai Kesadaran Politik

Menurut Ruslan (2000: 96) ada beberapa cara dalam mencapai kesadaran politik yang melalui beberapa hal yaitu:

a. Arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun non formal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan, dan pengajaran pendidikan politik langsung, yang dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin politik.
b. Pengalaman politik yang didapatkan dari partisipasi politik.
c. Kesadaran yang muncul dari belajar secara mandiri. Misalnya membaca koran dan buku-buku tentang politik, serta mengikuti berbagai peristiwa.
d. Kesadaran yang lahir melalui dialog-dialog kritis.
e. Ditambah dengan kesadaran politik yang merupakan hasil dari dua metode, yaitu *apprenticeship* dan generalisasi. Maka seluruh

metode ini akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kesadaran politik.

4. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesadaran Politik

Menurut Ruslan (2000: 97-98) kesadaran politik dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang memengaruhi kesadaran politik yang terpenting di antaranya adalah:

a. Jenis kultur politik di mana individu itu tumbuh darinya atau dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya.
b. Berbagai revolusi dan perubahan budaya yang terjadi di masyarakat.
c. Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu, juga tingkat pendidikannya.
d. Adanya pemimpin politik/sejumlah tokoh politik yang mampu memberikan arahan politik kepada masyarakat luas.

5. Indikator Kesadaran Politik

Menurut Soekanto (1982: 125) terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan).

Menurut Notoatmodjo (2003: 121) pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia yakni: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.

Menurut Arman (2002: 427) pemahaman adalah sesuatu hal yang seseorang pahami dan mengerti dengan benar, sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara memelajari sesuatu dengan baik supaya paham, dan memiliki pengetahuan. Pemahaman adalah hasil dari kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginter-pretasikan materi tersebut dengan benar.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dari itu pengetahuan dan pemahaman penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala desa.

Karena, sebagai warga negara atau sebagai individu tentunya minimal mengetahui dan memahami mengenai masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik.

> Menurut Notoatmodjo (2003: 124) mengemukakan bahwa sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap obyek sosial. Dan merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau obyek. Sikap adalah kesediaan atau kesiapan untuk bertindak yang terdiri dari menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab terhadap suatu objek. Sedang-kan tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan. Sikap dan tindakan politik juga penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala desa karena lebih menyadari akan tanggung jawab-nya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa.

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat, dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Kesadaran politik atau keinsyafan bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks. Karena itu tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat akan banyak tugas negara yang terbengkalai.

> Menurut Surbakti (2007: 144) menyebutkan aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajib-an kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.

> Menurut Wardhani (2008: 8) bahwa tingkat kesadaran dapat dibagi menjadi 4 yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan). Kesadaran politik yang rendah dapat dilihat apabila berada pada level pengetahuan dan pemahaman, sedang pada level sikap, dan tinggi pada level pola perilaku/tindakan.

B. Konsep Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata *part* yang berarti bagian. Jika kata *part* dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi *to participate*, yang bermakna turut ambil bagian.

> Menurut Damsar (2010: 10) politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota, negara kota. Dari polis berkembang konsep *polites* yang bermakna warga negara dan konsep *politikos* yang berarti kewarganegaraan. Dari penjelasan etimologis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa politik sebagai sesuatu yang berhubungan antara warga negara pada suatu (negara) kota. Sedangkan akar katanya dari bahasa Inggris adalah *politics*, yang bermakna bijaksana. Maka dari itu politik dapat dipahami sebagai suatu proses dan sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan warga negara dalam negara (kota).

> Menurut Budiardjo (1982: 1) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

> Sedangkan Rush dan Althop (2000: 123) berpendapat tentang partisipasi politik yakni keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan partisipasi politik, seperti pemilihan umum, penyampaian pendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta partisipasi melalui masyarakat di lingkungan keluarga dan kemasyarakatan.

Partisipasi dilakukan menurut kemampuan, kesiapan, dan kesempatan masing-masing. Setiap warga negara perlu memersiapkan diri agar mampu

berpartisipasi aktif dalam sistem politik yang ada. Partisipasi politik bukanlah dominasi setiap warga negara. Partisipasi politik ber-haluan kepada kehendak untuk memengaruhi pemerintah yang sedang berkuasa.

> Menurut Sastroatmodjo (1995: 68) yang menyatakan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan pemerintah.

Dengan demikian terdapat penjelasan tentang siapa yang berpartisipasi secara jelas, prosesnya dan tujuan partisipasi tersebut. Subyek pokoknya ialah warga negara. Prosesnya adalah memengaruhi kondisi yang sedang terjadi dalam pemerintah. Tujuannya ialah memengaruhi keputusan pemerintah.

Partisipasi politik bertujuan untuk memengaruhi mekanisme pemerintahan, namun selain itu juga perlu diperjelas bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain yaitu sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu sistem. Bahkan lebih jauh lagi bahwa partisipasi politik adalah suatu media untuk mengembangkan sistem politik untuk mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. Pada akhirnya sistem politik dapat berjalan kearah tujuan dengan stabil dan sukses.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, diketahui bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga masyarakat dalam berbagai struktur masyarakat baik disadari atau pun tidak untuk memengaruhi proses-proses politik dalam penentuan pengambilan kebijakan pemerintah, serta sebagai mekanisme kontrol bagi berlangsungnya dan hidupnya sistem politik.

2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Pada umumnya partisipasi politik dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan ataupun kesadaran dan kepercayaan seseorang terhadap sistem politik yang ada di lingkungannya. Dari sini akan ditentukan pula berbagai tipe atau bentuk partisipasi dalam masyarakat.

> Menurut Alfian (1986: 225-277) mengemukakan empat macam partisipasi politik: pertama, kalau pengetahuan/kesadaran politik masyarakat tinggi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik juga tinggi, maka masyarakat akan berpartisipasi secara aktif. Partisipasi masyarakat sehat karena mereka loyal dan mendukung sistem politik.

Kedua, partisipasi politik terjadi kalau pengetahuan/kesadaran politik yang tinggi diikuti oleh kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik yang berlaku. Suasana ini mengundang adanya sikap dan tingkah laku yang tampak membangkang, disertai sikap kurang atau tidak responsif dari masyarakat yang berkuasa dalam sistem politik itu. Ketiga, terjadi jika pengetahuan/kesadaran yang rendah berkaitan dengan kepercayaan yang tinggi terhadap sistem politik. Dalam suasana seperti itu, masyarakat memang tidak aktif berpolitik.

Keempat, muncul bilamana pengetahuan/kesadaran politik yang rendah berkaitan dengan kepercayaan yang rendah pula terhadap sistem politik. Dalam hal ini, walaupun masyarakat bersikap pasif, namun dalam kepasifannya itu masyarakat tertekan, terutama oleh karena perlakuan yang masyarakat anggap sewenang-wenang dari penguasa. Dari pendapat itu diketahui adanya empat tipe partisipasi, yaitu partisipasi politik aktif, membangkang, tradisional, dan pasif.

> Menurut Budiyanto (2006: 181) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara, dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non-konvensional, termasuk yang mungkin legal maupun ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik:

a. Konvensional
    1. Pemberian suara (*votting*);
    2. Diskusi politik;
    3. Kegiatan kampanye;
    4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan; dan
    5. Komunikasi individual dengan pejabat politik administrasi.
b. Non-Konvensional
    1. Pengajuan petisi;
    2. Berdemonstrasi;
    3. Konfrontasi;
    4. Mogok;
    5. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman, dan pembakaran; dan
    6. Tindak kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, pembunuhan, dan perang gerilya revolusi.

Berdasarkan uraian pendapat di atas, berbagai bentuk partisipasi politik terbagi dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat serta respon atau tanggapan setiap individu tersebut terhadap politik. Tetapi hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa bentuk

partisipasi politik itu dapat dibedakan dalam bentuk yang aktif dan yang pasif.

Adapun bentuk yang aktif antara lain: partisipasi melalui organisasi politik atau kemasyarakatan yang ada, rapat umum atau demonstrasi, penyaluran melalui media massa, pemberian suara dan serta diskusi politik termasuk juga di dalamnya ialah tindak kekerasan politik. Sedangkan yang termasuk dalam partisipasi politik pasif di antaranya ialah aliensi dan apatisme terhadap politik. Jika seolah-olah dalam sikap apatisme politik seseorang atau individu tidak terlibat dalam suatu proses politik. Tetapi dari sikapnya itu cukup diketahui bahwa sesungguhnya individu memiliki penilaian tersendiri terhadap politik. Sehingga sikapnya itu dapat dianggap sebagai partisipasi politik dalam bentuk lain.

> Menurut Huntington dan Nelson (1994: 16-17) menemukan bentuk-bentuk partisipasi politik yang berbeda, yaitu: a. Kegiatan pemilihan; b. *Lobbying;* c. Kegiatan organisasi; d. Mencari koneksi (*contacting*); e. Tindak kekerasan (*violence*).

Dalam penelitian ini, salah satu bentuk pemahaman hak sipil partisipasi politik yang digunakan adalah kegiatan pemilihan atau dalam hal ini adalah kegiatan pilkades dan memahami peran perangkat desa di desa Negeri Sakti kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran. Kegiatan adalah aktivitas, usaha, dan pekerjaan. Dimana menurut Huntington dan Nelson (1994), kegiatan pemilihan mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari

dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

Menurut Surbakti (2007: 144) membedakan tipe partisipasi masyarakat ke dalam empat macam, yaitu:

a. Partisipasi Aktif
   Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah atau dengan kata lain apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif.

b. Partisipasi Militan-Radikal
   Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun berbeda dari partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional, partisipasi ini cenderung mengutamakan cara-cara non konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dengan kata lain apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, maka akan melahirkan militan radikal.

c. Partisipasi Pasif
   Kegiatan warga negara yang menerima/menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak memersoalkan apapun kebijakan politik yang dibuat pemerintah atau dengan kata lain apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).

d. Partisipasi Apatis
   Kegiatan warga negara yang tidak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang ada atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis).

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Cholisin dan Nasiwan (2012: 149) menyatakan bahwa apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasinya cenderung aktif.

> Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif.

Berdasarkan teori Paige, jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif. Dengan tidak memiliki kesadaran politik dan tidak memiliki kepercayaan kepada pemerintah maka masyarakat cenderung tidak mau ikut berpartisipasi politik. Karena tidak ada lagi rasa ingin mengetahui isu-isu politik dan tidak ada rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang partisipasi politik adalah berdasarkan faktor kesadaran politik. Kesadaran politik menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang terbengkalai.

Negara berkembang khususnya Indonesia, masyarakat yang hidup di pedesaan jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat perkotaan, menuntut penanganan sungguh-sungguh dan aparat pemerintah atau penguasa setempat. Masyarakat pedesaan yang secara kuantitatif jauh lebih besar memiliki kesadaran politik yang minim sehingga berdampak pada kehidupan politik nasional. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap kemajuan perkembangan nasional di segala bidang.

> Menurut Budiyanto (2006: 185) antara lain menyatakan sekalipun sudah bangkit kesadaran nasional dan meningkatnya aktivitas kehidupan politik di tingkat pedesaan, namun masyarakat tani masih belum terkait secara aktif kepada pemerintah nasional dalam hubung-an timbal balik yang aktif dan responsif. Hubungan yang ada baru bersifat berat sebelah, yaitu dari atas ke bawah.

Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Dengan demikian sesungguhnya kegiatan-kegiatan pendidikan politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan perlu terus didorong dan ditingkatkan demi keberhasilan penyelenggaraan peme-rintahan dan pembangunan nasional.

> Sementara itu menurut Rahman (2007: 286), dipahami adanya partisipasi politik yang luas yaitu: modernisasi, perubahan struktur strata sosial, pengaruh intelektual, konflik dan intervensi yang kuat dan luas.

Penjelasan dari lima penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Modernisasi, kemajuan dalam segala bidang kehidupan menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru dan masyarakat sering berkembangnya modernisasi dan Industrialisasi yang cukup matang.
d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elit maka yang di cari adalah dukungan rakyat, terjadi perjuangan

kelas antara para pesaing politik maka kelompok-kelompok politik mencari strategi untuk meraih dukungan masa.

e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktifitas pemerintah sering menyebabkan timbulnya tuntunan-tuntunan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Istilah partisipasi seringkali digunakan untuk memberi kesan meng-ambil bagian dalam sebuah aktivitas. Mengambil bagian dalam sebuah aktivitas dapat mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut.

Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), ada keterlibatan secara emosional, dan memeroleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Berikut ini adalah beberapa defenisi partisipasi politik menurut para ahli juga disertai indikator-indikator partisipasi politik yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4: Beberapa Definisi Partisipasi Politik

Pendapat	Definisi	Indikator
Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson (1984: 5)	Partisipasi politik...kegiatan warga preman (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.	Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan; Memiliki tujuan memengaruhi kebijakan publik; dan Dilakukan warga negara preman (biasa).
Michael Rush & Philip Althoff (2003: 23)	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik	Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik dan Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi.
Herbert Mc Closky dalam Miriam (1994:183- 184)	Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary)* dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.	Warga negara terlibat dalam proses politik.
Miriam Budiarjo (1994: 183)	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah *(public policy).*	Berupa kegiatan individu atau kelompok dan Bertujuan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau memengaruhi kebijakan publik.
Ramlan Surbakti (1992: 140-141)	Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya. ... sesuai dengan istilah partisipasi, (politik) berarti	Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan Dilakukan oleh warga negara biasa.

	keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak memunyai kewenangan) dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan.	

Sumber: Gatara, Said A.A & Said, Dzulkiah Moh (2007)

Berdasarkan pendapat para ahli pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

C. Hubungan Kesadaran Politik dan Partisipasi Politik

> Menurut Rosanvallon (2008, 20) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan telah memenuhi seluruh dimensi demokrasi, yaitu ekspresi, keterlibatan, dan intervensi. Dalam pemilihan umum, masyarakat bersepakatmelalui pemungutan suara untuk mencapai keinginan bersama, dan keinginan tersebut terpenuhi oleh suara terbanyak. Jika penyelenggaraan pemilu berlangsung sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, maka tidak akan muncul alternatif lain dalam melakukan partisipasi politik selain menggunakan jalur-jalur yang telah disediakan oleh negara.

Dalam pemilihan umum, Masyarakat cenderung memilih partai yang reliabel, artinya partai yang dianggap dapat mengusung kepentingan masyarakat dan prilaku partai dapat diprediksi dalam mengusung isu tertentu (Stokes 2004, 7- 8). Permasalahannya, sikap partai yang cenderung mengalami perubahan akibat kepentingan tertentu mengakibatkan sulitnya menentukan partai yang reliabel.

> Perubahan yang terjadi ditingkat elit politik mendorong terjadinya perubahan ditingkat masyarakat. Perubahan sosial berkontribusi dalam meningkatkan kecurigaan satu sama lain ditingkat masyarakat (Rosanvallon 2008, 10 - 11). Kecurigaan interpersonal, dipertegas oleh Rosanvallon, juga dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap manfaat saluran partisipasi yang telah disediakan oleh pemerintah, termasuklah pemilu atau pilkades.

Menurunnya partisipasi pemilih menunjukkan adanya ketidak percayaan masyarakat terhadap institusi-institusi politik. Pemilu yang telah dilaksanakan tidak menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

> Namun, menurunnya partisipasi pemilih bukan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sikap apatis terhadap politik, ketika disisi lain masyarakat menggunakan cara-cara yang unkonvensional dalam berpartisipasi (Rosanvallon 2008, 19).

Fenomena munculnya banyak kelompok masyarakat sipil yang terorganisir membantah bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum mengindikasikan ketidakdewasaan berpolitik, ataupun rendahnya pemahaman terhadap politik. Terlebih lagi dalam pemilihan kepala desa, dimana partisipasi masyarakat sangat erat karena kedekatan calon yang ada atau hal lain yang mendukung terlaksananya pilkades tersebut.

> Rosanvalon (2008, 19) menjelaskan bahwa terjadi perubahan bentuk dalam kepedulian terhadap politik. Masyarakat memiliki cara-cara unkonvesional yang menunjukkan tingkat partisipasi politik cukup tinggi disaat partisipasi memilih mengalami penurunan.

> Dalam hal ini, Munroe (2002, 4) membagi partisipasi politik menjadi dua, yaitu partisipasi politik konvensional dan unkonvensional. Dijelaskan oleh Munroe bahwa partisipasi politik konvensional terjadi ketika masyarakat melakukan rutinitas dan kebiasaan dalam sistem politik sebuah negara. Masyarakat menggunakan saluran yang sudah disediakan oleh negara dalam berpartisipasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan partisipasi politik unkonvensional terjadi ketika masyarakat secara mandiri menggunakan cara-cara yang dinilainya efektif dan tidak mengandalkan jalur yang disediakan pemerintah.

Beranjak dari definisi yang dijelaskan oleh Munroe, partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik konvensional. Masyarakat menggunakan jalur yang disediakan negara dalam memenuhi seluruh dimensi demokrasi sebagaimana halnya yang dijelaskan Stokes. Permasalahannya, menurut Munroe (2002, 6) partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik unkonvensional berbanding terbalik. Ketika partisipasi politik konvensional mengalami peningkatan, maka secara otomatis partisipasi politik unkonvensional mengalami penurunan. Dan kondisi tersebut berlaku sebaliknya jika terjadi pada pilkades, dimana keterlivatan masyarakat dikarenakan faktor kedekatan emosional dan faktor kepercayaan kepada calonnya.

D. Kerangka Pikir

Untuk memfokuskan penelitian ini maka dibuatlah kerangka berpikir agar penelitian ini sesuai dengan latar belakang dan tujuan penelitian pada ban terdahulu.

> Menurut Budiyanto (2006: 185), kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan *urgensi* urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kesadaran politik atau keinsyafan hidup bernegara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang terbengkalai. Maka dari itu kesadaran politik dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya untuk dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapinya.

> Menurut Ramlan Surbakti (1992: 140) mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.

> Sedangkan Rush dan Althop (2000: 123) berpendapat tentang partisipasi politik yakni keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan partisipasi politik, seperti pemiliham umum, penyampaian pendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta partisipasi melalui masyarakat di lingkungan keluarga dan kemasyarakatan.

> Menurut Soekanto (1982: 125) terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan).

Pengetahuan dan pemahaman penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala desa. Karena, sebagai warga negara atau sebagai individu tentunya minimal mengetahui dan memahami mengenai masalahmasalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu akan mampu

meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik. Sikap dan tindakan politik juga penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala desa karena lebih menyadari akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa.

Untuk mengetahui gambaran bagaimana pengaruh kesadaran akan hak sipil dan terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa dan perangkat desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran akan disajikan dalam bagan/gambar sebagai berikut:

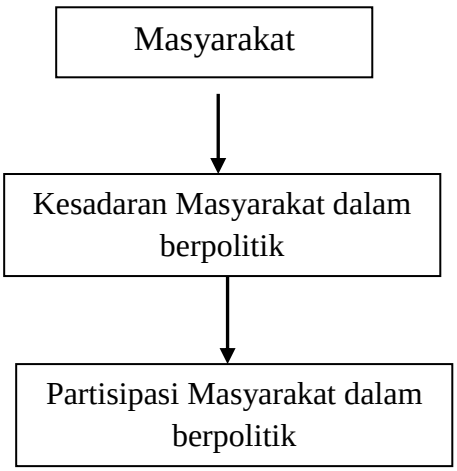

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir Penelitian

E. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2011: 50) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris berdasarkan data lapangan. Dalam penelitian ini yang berjudul tentang Pengaruh Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Kesadarar politik sangat penting guna memahami fenomena politik yang terjadi, sehingga seseorang dapat paham dan tanggap akan fenomena politik tersebut. Dengan adanya kesdaran politik yang baik, maka seseorang tersebut akan sadar pentingnya politik dalam kehidupan sehingga seseorang tersebut akan melibatkan dirinya atau berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Sedangkan keberadaan politik masyarakat adalah segala perilaku dan tindak tanduknya dalam kegiatan politik entah baik atau buruk akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Ketika prlaku politik memiliki perilaku politik yang baik maka masyarakat akan ikut serta dalam kegiatan politik dan termotivasi untuk terjun dalam kegiatan tersebut. Masyarakat sadar dengan ikut kegiatan politik atau berpartisipasi dalam politik, antara pelaku politik dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan kesejahteraan melalui kegiatan politik dengan cara partisipasi politik.

Berdasarkan pendapat di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_0 : " Tidak ada Pengaruh Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tatan Kabupaten Pesawaran".

H_a : "Ada Pengaruh Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran"

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dua variabel sehingga menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan metode penggunaan angket dan wawancara, yang artinya penelitian yang menggunakan data yang sama dimana peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

> Menurut Mardalis (2004: 26) Penelitian eksplanatori tidak hanya sekedar memberikan gambaran mengenai suatu gejala sosial tertentu yang menjadi fokus perhatian yang ingin dijelaskan, tetapi juga bagaimana hubungannya dengan gejala sosial lainnya, dan mengapa hubungannya seperti itu. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian pengujian hipotesis yang menguji hubungan sebab akibat diantara variabel yang diteliti.

> Menurut Prasetyo (2005: 43) Pendapat lain juga menjelaskan bahwa metode eksplanatif dirancang untuk menemukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat kemudian data yang diperoleh diolah dan disusun sampai diperoleh kejelasan tentang hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Tujuan utama dalam penggunaan metode ini adalah untuk menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat.

Berdasarkan uraian di atas bahwa metode penelitian eksplanatif adalah penelitian yang mencari hubungan sebab akibat yang menggunakan variabel

bebas dengan variabel terikat. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian eksplanatif, dimana hubungan sebab yakni kesaradan politik akan menimbulkan partisipasi politik masyarakat.

Metode ini digunakan sebagai cara yang dilakukan oleh peneliti agar dapat menjelaskan secara lengkap mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari kesadaran politik terhadap partisipasi politik, sampel dari suatu populasi ditentukan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melalui pengujian hipotesa sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh kesadaran hak sipil dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa serta perlengkapan desa di Desa Negeri Sakti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendefinisikan dan mengumpulkan fakta-fakta yang diteliti yaitu pengaruh kesadaran hak sipil dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa serta perlengkapan desa di Desa Negeri Sakti. Penelitian ini akan menjelaskan makna hubungan (korelasi) antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas (kesadaran politik) dan variabel terikat (partisipasi politik) secara lengkap dengan kajian akademik dan empirik yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan definisi konsep penelitian agar memermudah penelitian ini dilakukan terkait masalah yang akan diteliti.

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Kesadaran Politik

   Karel Vasak ahli hukum Perancis sebagaimana dikutip Haryanto (2000), membagi sejarah perkembangan HAM dalam tiga generasi. Generasi pertama HAM adalah hak sipil dan politik yang berimplikasi pada tuntutan masyarakat terhadap perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ini muncul sebagai buah dari ketidakadilan sosial dimana perjuangan masyarakat berpusat pada tuntutan atas pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Generasi ketiga dikenal sebagai hak solidaritas, yang muncul menjelang akhir abad 20. Hak ini diperjuangkan tidak hanya semata-mata untuk kepentingan individu tetapi juga kepentingan kelompok.

2. Partisipasi Politik

   Dalam penelitian ini, salah satu bentuk partisipasi politik yang digunakan adalah mengetahui partisipasi masyarakat dan kesadaran akan hak-hak politiknya. Kegiatan adalah aktivitas, usaha, dan pekerjaan.

   > Dimana menurut Huntington dan Nelson (1994), kegiatan pemilihan mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.

   Menurut Surbakti (2007: 144) membedakan tipe partisipasi masyarakat ke dalam empat macam, yaitu:

a. Partisipasi Aktif

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah atau dengan kata lain apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif.

b. Partisipasi Militan-Radikal

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun berbeda dari partisipasi aktif, yang cenderung meng-utamakan cara-cara konvensional, partisipasi ini cenderung mengutamakan cara-cara non konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dengan kata lain apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, maka akan melahirkan militan radikal.

c. Partisipasi Pasif

Kegiatan warga negara yang menerima/menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak mempersoalkan apapun kebijakan politik yang dibuat pemerintah atau dengan kata lain apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).

d. Partisipasi Apatis

Kegiatan warga negara yang tidak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang ada atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif tertekan (*apatis*).

C. Definisi Oprasional

> Menurut Sugiyono (2004: 31), definisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Defisini operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti adalah:

Tabel 5: **Variabel dan Indikator**

No	Variabel	Indikator
1	**Kesadaran Politik**	Mengetahui arti pilkades
		Mengetahui adanya pilkades
		Mengetahui perda pilkades
		Memahami pentingnya pilkades
		Memahami dan sadar atas kewajiban warga negara
		Memahami informasi kandidat
		Mengetahui hak dan kewajibannya dalam pilkades
2	**Partisipasi Politik**	Ikut kampanye
		Berperan aktif
		Ikut berpartisipasi dalam pilkades

		Ikut menciptakan situasi yang kondusif
		Ikut berperan aktif dalam pilkades
		Ikut mensukseskan pilkades
		Mengkritisi kepala desa yang menang
		Mengkritisi hasil pilkades
		Berdemonstrasi

Sumber: diolah oleh penulis tahun 2017

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2013 dimana kesadara akan hak memilih pilih dan dipilih sebagai warga Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2007: 72) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

> Menurut Siregar (2013: 30) populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi sangat populer dipakai untuk menyebutkan serumpun/ sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah masyarakat yang mempunyai hak secara hukum dan memenuhi persyaratan secara hukum di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Tabel 6: Sebaran Penduduk dan yang Mempunyai Hak Pilih

Populasi	Kepala Keluarga	Laki - laki	Pemilih	Perempuan	Pemilih
5349 jiwa	1396	2620 jiwa	1011 jiwa	2729 jiwa	1108 jiwa

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan data maka jumlah mata pilih di desa Negeri Sakti pada sebanyak 2119 mata pilih dari populasi penduduk 5349 jiwa.

2. Sampel

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan menggunakan instrumen kuesioner sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik *random sampling,* yaitu agar setiap *sample* populasi dapat memiliki kesempatan atau peluang yang sama. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, digunakan rumus Teknik Solvin pengambilan sampel untuk populasi yang sudah diketahui dalam Siregar (2013: 34) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Keterangan:

n: Banyaknya sampel

N: Jumlah populasi

d: Tarif nyata (0,10)

Hasil perhitungan:

$$n = \frac{2119}{(2119 \text{ x } 0{,}10^2) + 1}$$

$$n = \frac{2119}{(2119 \text{ x } 0{,}01) + 1}$$

$$n = \frac{2119}{21{,}19 + 1}$$

$$n = \frac{2119}{22{,}19}$$

n = 100

Sampel dalam penelitian ini ± 100 orang

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *random sampling*, yang memberikan kesempatan sama kepada setiap masyarakat untuk dijadikan sampel, yang diambil sebanding dengan banyaknya sub mata pilih di setiap dusun dengan rumus:

$$N_h = \frac{N_i}{N} \; x \; n$$

Keterangan:

Nh : Banyaknya sampel dari setiap kelompok
n : Jumlah sampel yang mewakili populasi
N*i* : Jumlah populasi masing-masing dusun
N : Jumlah populasi.

F. Jenis Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sumber data ini adalah responden yang diperoleh melalui hasil kuesioner

yang dibagikan kemudian dilakukan wawancara untuk memeroleh informasi tambahan berkaitan dengan penelitian ini.

Data primer diperlukan sebagai data untuk memeroleh hasil yang akurat sehingga data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik dari hasil kuesioner maupun wawancara kepada responden. Berdasarkan penjelasan di atas, maka data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian secara langsung. Menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang tinggal di Desa tersebut.

Pada penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer adalah masyarakat yang ada di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang mewakili setiap dusun di wilayah tersebut. Data primer dengan menggunakan kuesioner dengan menyebarkan secara acak kepada masyarakat yang berada di dusun-dusun Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini dipergunakan sebagai pendukung. Sumber data ini antara lain dokumentasi, undang-undang, buku-buku, koran, jurnal, majalah, arsip-arsip, dan informasi lainnya yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder, dalam penelitian ini peneliti memerlukan data-data berupa arsip kependudukan dari masyarakat Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan

Kabupaten Pesawaran. Sehingga peneliti mengumpulkan data berupa arsip atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip jumlah kependudukan Desa Negeri Sakti dan arsip Monografi Desa Negeri Sakti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

> Menurut Koentjaraningrat (1977: 215) menyatakan bahwa kuesioner merupakan suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu hal atau dalam sesuatu bidang.

Kuesioner ini kemudian disebarkan kepada responden yaitu masyarakat di Desa Negeri Sakti kecamatan Gedong Tataan untuk diisi atau dijawab kemudian setiap pertanyaan disediakan alternatif jawaban berjenjang dan setiap jenjang pertanyaan diberi skor yang tidak sama pada setiap jenjang jawabannya.

2. Dokumentasi

Teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber atau referensi yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku, undang-undang, arsip, data, surat kabar, jurnal, serta informasi lainnya yang diperoleh dari internet.

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah mengadakan pengolahan data dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (*SPSS*) 17.

Menurut Siregar (2013: 86) pengolahan data dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu proses dalam memeroleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. *Editting* adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan.

2. Koding adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data yang akan dianalisis. Pemberian kode melalui program *Microsoft exel* sebelum memasukkannya ke dalam program *SPSS* 17.

3. *Format Entry Data* di Program *SPSS 17* merupakan suatu proses pembuatan format pengerjaan data pada program *SPSS* sebelum nantinya data dimasukkan ke dalam komputer. Adapun yang digunakan yaitu untuk mengukur uji validitas dan reliabilitas, uji hipotesis, dan data hasil kuesioner penelitian.

4. Pemindahan data adalah memasukkan data yang telah didapat (berupa kode) ke dalam mesin pengolah data yaitu *SPSS* 17, sehingga nantinya didapatkan hasil dari pengelolahan tersebut dalam bentuk tabel.

5. Tabulasi adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data.

6. Penyajian Data adalah suatu bentuk penyajian data ke dalam bentuk tabel, baik itu dalam tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang yang nantinya dapat digunakan untuk penyajian data di dalam isi penelitian.

I. Teknik Penentuan Skor

Menurut Sugiyono (2005: 108) Setelah seluruh data yang diperoleh dalam penelitian diuraikan, maka pada tahap selanjutnya akan dilakukan pem-bahasan data yang telah diuraikan tadi. Interpretasi data secara keseluruhan untuk masing-masing variabel dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari responden.

Berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan. Adapun Penskoran yang digunakan untuk mengklasifikasikan data tersebut adalah: Penskoran menggunakan penilaian sebagai berikut:

a) Untuk alternatif jawaban a diberi skor 4
b) Untuk alternatif jawaban b diberi skor 3
c) Untuk alternatif jawaban c diberi skor 2
d) Untuk alternatif jawaban d diberi skor 1

Kemudian untuk menentukan kategori jawaban responden terhadap masing-masing alternatif apakah tergolong sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah maka dapat ditentukan kelas intervalnya, dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{skor\ tertinggi - skor\ terendah}{banyak\ bilangan}$$

J. Teknik Uji Hipotesis

a. Analisis regresi sederhana

1) Mencari korelasi X dengan Y dengan mengguynakan rumus:

$$r_{xv} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

(Sugiyono 2013: 255)

2) Mencari koefisien determinan (r^2)

Koefisien determinan adalah tingkat pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Rumus yang digunakan adalah:

$$r^2 = \frac{(a_1 \sum xy)}{\sum y^2}$$

Keterangan:

r^2 = koefisien determinan antara Y dengan x

a_1 = koefisien prediktor x

$\sum xy$ = Jumlah produk x dengan y

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat kriterium y

(Hadi, 2004: 22)

3) Menguji signifikansi dengan uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi antar variabel.

Adapun rumus uji t adalah:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = nilai hitung

r = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

(Sugiono, 2013: 230)

4) Membuat garis regresi linear sederhana

Rumus yang digunakan:

$$Y = aX + K$$

Keterangan:

Y = Kruterium

X = Prediktor

a = bilangan koefisien predictor

K = bilangan konstan

(Hadi, 2004: 1)

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Negeri Sakti

Sebagai desa yang penduduknya merupakan penduduk agraris, desa Negeri Sakti mengandalkan pengembangan ekonominya dari pertanian dan perkebunan, dimana sebagainan besar hasil kebun berupa kopi, coklat, dan hasil kebun palawija lainnya. Sementara pertanian terbatas karena desa negeri sakti sejak dahulu merupakan petani perkebunan, jadi pertaniaan hanya ada di daerah rendah yang terdapat aliran sungainya. Sikap hidup masyarakat desa Negeri Sakti seperti umumnya masyarakat perkebunan adalah masyarakan yang mempunyai toleransi yang baik, terlebih lagi merupakan ciri umum masyarakat agrasis di Indonesia.

Desa Negeri Sakti merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gedong Tataan, kabupaten Pesawaran, Lampung. Secara umum desa Negeri Sakti berbatasan dengan sebelah Utara Desa Suka Banjar, sebelah Selatan desa Sungai Langka, sebelah Barat desa Bernung, dan sebelah Timur desa Kurungan Nyawa. Selain itu letak geografis desa Negeri Sakti adalah terletak pasa Longitude 5^0 22’ 17 ‘’ Selatan dan Latitude 105^0 10’ 31’’ Timur. Desa Negeri Sakti mempunyai luas wilayah 1.327,0 HA dengan pembagian lahan

sawah 50 HA, Ladang 25 HA, perkebunan 250,04 HA dan lahan peternakan 15 HA.

Tabel 7: Sebaran penduduk dan keadaan penduduk di desa Negeri Sakti sampai dengan tahun 2016/2017.

No	Penggolongan Keluarga	Jumlah dalam Kepala Keluarga
1	Keluarga Pra Sejahtera	321 KK
2	Keluarga Sejahtera 1	230 KK
3	Keluarga Sejahtera 2	320 KK
4	Keluarga Sejahtera 3	284 KK
5	Keluarga Sejahtera 3 plus	48 KK
	Jumlah Kepala Keluarga	1.396 KK

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan sebaran tersebut jika di lihat dari jumlah penduduknya sebanyak 5.349 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.729 jiwa dan perempuan 2.620 jiwa.

Tabel 8 : Sebaran penduduk berdasarkan golongan usia sampai dengan tahun 2016/2017.

No	Usia (dalam tahun)	Jumlah (dalam jiwa)
1	0 – 17	1.598
2	18 – 56	3.244
3	56 tahun ke atas	507

Sumber: Pengolahan data

Sedangkan bedasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 9 : Sebaran tingkat pendidikan sampai dengan tahun 2016/2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	150 orang
2	Sekolah Dasar/sederajat	200 orang
3	SMP/sederajat	250 orang
4	SMA/sederajat	100 orang
5	Akademi/D1 – D3	35 orang
6	Sarjana S1	40 orang
7	Sarjana S2	7 orang
	Jumlah	782 orang

Sumber: Pengolahan data

Sedangak berdasarkan mata pencaharian masyarakat desa Negeri Sakti dapat dilihat dalam table berikut ini

Tabel 10: Mata pencaharian masyarakat desa Negeri Sakti

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	**122**	**15**
2. Buruh tani	**36**	**20**
3. Pegawai Negeri Sipil	**93**	**20**
4. Pengrajin industri rumah tangga		**1**
5. Pedagang keliling	**2**	**6**
6. Pensiunan TNI/POLRI	**6**	
Jumlah		

Sumber: Pengolahan data penelitian

Berdasarkan pada table di atas dapat dilihat bahwa penduduk desa Negeri Sakti merupakan masyarakan agraris yang bekerja di lahan pertanian atau sebagai petani, dan pada tingkat kedua adalah sebagai PNS dan yang berikutnya adalah buruh tani karena menggarap lahan pertanian milik perorangan atau milik badan usaha.

Untuk melihat pendapatan rata – rata penduduk dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 11. Pendapata Riil Masyarakat desa Negeri Sakti

1. Jumla Kepala Keluarga (KK)	**1.203**
2. Jumlah Anggota Keluarga (Orang)	**4.856**
3. Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga (Rp)	**900.000**
4. Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang Bekerja (Rp)	**1.150.000**
5. Jumlah Total Pendapatan Keluarga (Rp) (3+4)	**2.050.000**
6. Rata-rata Pendapatan Peranggota keluarga (Rp) (5/(1+2))	**410.000**

Smber: Pengolahan data penelitian

B. Sejarah Berdirinya Desa Negeri Sakti

1. Sejarah Desa

Semula Desa Negeri sakti adalah kelompok masyarakat dan tamba pupus yang menghuni wilayah ini sejak tahun 1880, lalu pada mulanya masyarakat ini membentuk kepengururan dan di pimpin pertama kali oleh Pangeran Tihang pada tahun 1880 s/d 1891. selanjutnya pimpinan desa di pimpin secara berirutan sebagai berikut:

Tabel 12 : Pemangku jabatan yang pernah memimpin desa Negeri Sakti sampai dengan saat ini:

No	Pemimpin	Periode kepemimpinan
1	Mangku Bumi	1891 s/d 1900
2	Haji Abdur Rani	1900 s/d 1915
3	Lajoran Batin	1915 s/d 1922
4	Raja Marga	1922 s/d 1929
5	Kiyai Ratu Marga	1929 s/d 1936
6	Hj. Murni Susunan Ratu	1936 s/d 1943
7	Ratu Sakti	1943 s/d 1956
8	M. Dahro P. Bandar	1956 s/d 1979
9	Syamsudun Dahro	1979 s/d 1998
10	Zaenal Abidin., SE.	1998 s/d 2007
11	Sahbuddin	2007 s/d 2013
12	Gema Sukma Jaya	2013 s/d 2019

Sumber : Pengolahan data

Desa Negeri Sakti terdiri dari delapan Rukun Warga (RW) memiliki adat istiadat yang berbeda karena penduduknya merupakan pembauran dari Suku Jawa Suku Lampung, Suku Batak, Suku Lampung Pesisir. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Negeri Sakti ini bersumber dari lahan perkebunan Coklat dan Kopi yang cukup mendominasi lahan perkebunan desa Negeri Sakti ini. Selain itu Desa Negeri Sakti terdiri dari

20 RT dengan jumlah bantuan untuk pengembangan tingkat RW sebasar Rp. 724.386.00 per RW dan Rp 250.000,00 per RT nya.

Budaya gotong royong sebagai warisan budaya yang adi luhung terus dipupuk umuk membangun berbagai macam sarana dan prasarana Desa Negeri Sakti. Masa jabatan Kepala Desa Sahbudin diteruskan oleh Bapak Gema Sukma Jaya pada tanggal 19 Juni 2014 resmi ditetapkan oleh Bupati Pesawaran. Sebagai penerus dari pejabat sebelumnya dan pengalaman dari bapak Gema Sukma Jaya, maka peningkatan perbaikan dari berbagai unsure menjadi perhatian beliau, selain itu berdasarkan pengalaman beliau dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi yang lain menjadi bekal dalam meningkatkan partisipasi masyarakan dalam membangun desanya.

2. Kronologi Pemilihan Kepala Desa Negeri Sakti kecamatan Gedong Tataan.

Berdasarkan hasil analisis data yang penulis dapatkan bahwa pada tahun 2013 dilakukan pemilihan kepala desa. Seperti pada umumnya pemilihan kepala desa di kecamatan Gedong Tataan, para calon kepala desa mendaftarkan diri ke panitia pemilihan kepada desa yang di tunjuk dan di sahkan oleh camat Gedong Tataan. Dengan dibukanya kesempatan pemilihan kepala desa maka dalam data yang penulis temukan didapatlah empat calon atau kandidat yang terdiri dari 3 calon laki-laki dan 1 calon perempuan atas nama : 1) Bapak Gema Sukma Jaya; 2) Bapak Idham Kholik; 3) Ibu Kartina Wati; dan 4) Bapak Yusni Nurdin.

Menurut data yang di dapat perolehan suara terbanyak di peroleh bapak Gema Sukma Jaya sebesar 48%, selanjutnya Bbapak Idham Kholik sebesar 21 %; lalu ibu Kartina Wati sebesar 18 %; dan diikuti bapak Yusni Nurdin sebesar 13 %.

Proses sebelum pemilihan seperti pada umumnya pemilihan kepala desa di dahului dengan kampanye dengan menyebarkan player gambar kandidat kepala desa. Kemudian masing - masing calon kepala desa mempunyai tim pemenangan yang bertujuan menjelaskan visi dan misi para calon kepala desa tersebut. Dalam masa ini kecamatan Gedong Tataan memberikan kesempatan masa kampanye selama 3 bulan dan masa tenang selama 1 minggu. Pada hari pemilihan dibentuklah panitia yang sudak di tetapkan pada masa pendaftaran untuk menjadi panitia pemilihan kepala desa Negeri Sakti tersebut.

Pemilihan dilakukan dalam satu hari dan hasilnya di umumkan pada hari yang sama, seperti pada pemilihan yang lain partisipasi masyarakat 92 % mengikuti pemilihan langsung tersebut, kemudian sisanya di wakilkan karena sesuatu hal seperti sakit atau tidak ikut memilih karena faktor usia dan ingatan yang terbatas.

3. Demografi Desa

a. Letak dan luas wilayah

Desa Negeri Sakti merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Gedong Tataan yang terletak ± 4 km kearah barat daya kecamatan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kurungan Nyawa,

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Langka, sebelah utara berbatasan dengan Desa Suka Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bernung Kabupaten Pesawaran. Desa Negeri Sakti mempunyai luas wilayah 1.327,04 Ha.Desa Negeri Sakti terdiri dari dataran rendah ketinggian 250-300 m dari permukaan laut.

b. Iklim

Iklim Desa Negeri Sakti mempunyai iklim yang sama seperti desa lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mem–punyai pengaruh pada pola tanam.Curah hujan rata-rata 2.000-3.000 mdl, jumlah bulan hujan dalam setahun rata rata 7 bulan dan suhu rata-rata 30-32 C.

c. Keadaan Sosial Desa

Jumlah penduduk

Desa Negeri Sakti berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.349 jiwa. Jumlah laki-laki 2.729 jiwa, jumlah perempuan 2.520 jiwa, jumlah kepala keluarga 1.396 KK, jumlah keluarga miskin 321 KK, keadaan sosial dalam dusun dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 13: Jumlah Penduduk Desa Negeri Sakti

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Total
			Laki – Laki	Perempuan	
1	Negeri Ampai	263	484	492	976
2	Negeri Tua	203	222	204	426
3	Srimenanti	112	281	288	569
4	Srimulyo	255	510	466	976
5	Banjar Negeri	136	266	249	515
6	Curup	80	163	152	315
7	Sinar Negeri	234	467	443	910
8	Solehuddin	191	350	354	704
Jumlah		**1374**	**2743**	**2648**	**5391**

Sumber: Data Monografi Desa Negeri Sakti

Tabel 14: Kepala Dusun dan Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Tetangga

No	Nama Dusun	Kepala Dusun	Rukun Tetangga	Ketua Rukun Tetangga
1	Negeri Ampai	Zaimi	1	Aliyansah
			2	Sahidiri
			3	Sahanan
2	Negeri Tua	Syahrudin	4	Rahmat
			5	Eryuni
3	Srimenanti	Hendri Dunan	6	Zulkifli
			7	Suyitno
4	Srimulyo	Suhendra	8	Suntama
			9	Rohma
			10	Erdi Syah Adi
			21	Sugiyanto
5	Banjar Negeri	Devi Apridian	11	Hermansyah
			12	Romadhon
6	Curup	Ropiyudin	13	Nurin
			14	Hidayat
7	Sinar Negeri	Idham Khalik	15	Bebi Santoso
			16	Iqbal
			17	Ponidi
8	Solehudin	Sukmono	18	Suwandi
			19	Surnaka
			20	Haris Fadilah

Sumber : Pengolahan Data Dea Negeri Sakti 2017

d. Keadaan Ekonomi Desa

1. Mata pencaharian

Karena Desa Bujuk Agung merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 15: Mata Pencaharian Penduduk Desa Negeri Sakti

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh tani/perkebunan	269
2	Petani	1.610
3	Peternak	3
4	Pedagang	43
5	Tukang kayu	14
6	Tukang batu	8
7	Penjahit	5
8	PNS	10
9	Wiraswasta	260
10	Tni/polri	3
11	Perangkat kampung	36
12	Pengrajin	1
13	Industry kecil	3
14	Buruh industry	16
15	Supir	35
16	Lain-lain	908

Sumber: Data Monografi Desa Negeri Sakti

2. Pola penggunaan tanah

Panggunaan tanah di Desa Negeri Sakti sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian/perkebunan.

Tabel 16. Pola Penggunaan Tanah Desa Negeri Sakti

No	Jenis lahan/tanah	Jumlah
1	Tanah perkabunan rakyat	508 ha
2	Tanah pemukiman penduuk	236 ha
3	Tanah lahan perkantoran	1 ha
4	Tanah lapangan	2 ha
5	Lainnya	21 ha
Jumlah Total		**750**

Sumber: Data Monografi Desa Negeri Sakti

3. Pemilikan ternak

   Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Negeri Sakti adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Data Kepemilikan Ternak Desa Negeri Sakti

No	Jenis Hewan Ternak	Jumlah
1	Ayam	2.905 ekor
2	Kambing	827 ekor
3	Itik	100 ekor
4	Kerbau	30 ekor
5	Sapi	675 ekor

Sumber: Data Monografi Desa Negeri Sakti

4. Sarana dan prasarana kampung

   Kondisi sarana dan prasarana Desa Negeri Sakti secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Desa Negeri Sakti

No	Sarana dan Prasarana Kapung	Jumlah
1	Jumlah jalan kampung	30 km
2	Balai kampong	1 unit
3	TPA	3 unit
4	Sekolah SD/MI	2 unit
5	Sekolah SMP/MTS	1 unit
6	Sekolah SLTA	1unit
7	Sekolah TK	2 unit
8	Puskesmas pembantu	1 unit
9	Masjid	1 unit

Sumber: Data Monografi Desa Bujuk Agung

5. Kondisi pemerintahan Desa

   Pada Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, susunan organisasi pemerintahannya yaitu sebagai berikut :

Tabel 19: Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Negeri Sakti

No	Nama	Jabatan
1	Gema Sukma Jaya	Kepala Kampung
2	Tohari	Sekretaris/Kaur Pemerintahan
3	Riskanti	Bendahara
4	Burhanuddin., SP	BPD
5	Khairun	Kaur Pemerintahan
6	Nur Syahili	Kaur Pembangunan
7	Nanda Aprilia	Kaur Umum

Sumber: Data Monografi Desa Negeri Sakti

Untuk melihat partisipasi penduduk desa Negeri Sakti dalam kepesertaannya dalam pemilihan kepala desa dapat di lihat pada table berikut

Tabel 20: Data Pemilih dan Aktifitas Penduduk dalam Pemilihan Kepala Desa Negeri Sakti Tahun 2014

No	Nama Dusun	Mata Pilih	Yang Memilih	Persentase
1	Negeri Ampai	85	78	96 %
2	Negeri Tua	73	70	96 %
3	Srimenanti	69	67	97 %
4	Srimulyo	78	75	96 %
5	Banjar Negeri	95	92	97 %
6	Curup	90	88	98 %
7	Sinar Negeri	102	98	96 %
8	Solehudin	87	86	99 %

Sumber: Pengolahan data desa Negeri Sakti tahun 2014.

Tabel berikut adalah partisipasi masyarakat dalam pilkada kabupaten pesawaran tahun 2015

Tabel 21: Partisipasi Masyarakat Kabupaten Pesawaran Dalam Pilkada Tahun 2015

No	Kecamatan	DPS (dafta pemilih sementara	DPSHS menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap)
1	Gedong Tataan	72853	68613
2	Negeri Katon	65856	51937
3	Way Lima	33263	31241
4	Punduh Pidada	12660	11966
5	Kedondong	30216	26636
6	Marga Punduh	12483	11768
7	Way Khilau	23872	20781
8	Teluk Pandan	25524	24479
9	Way Ratai	76206	25374
10	Padang Cermin	22326	19297
11	Tegineneng	50945	39565

Sumber: Pengolahan data 2017

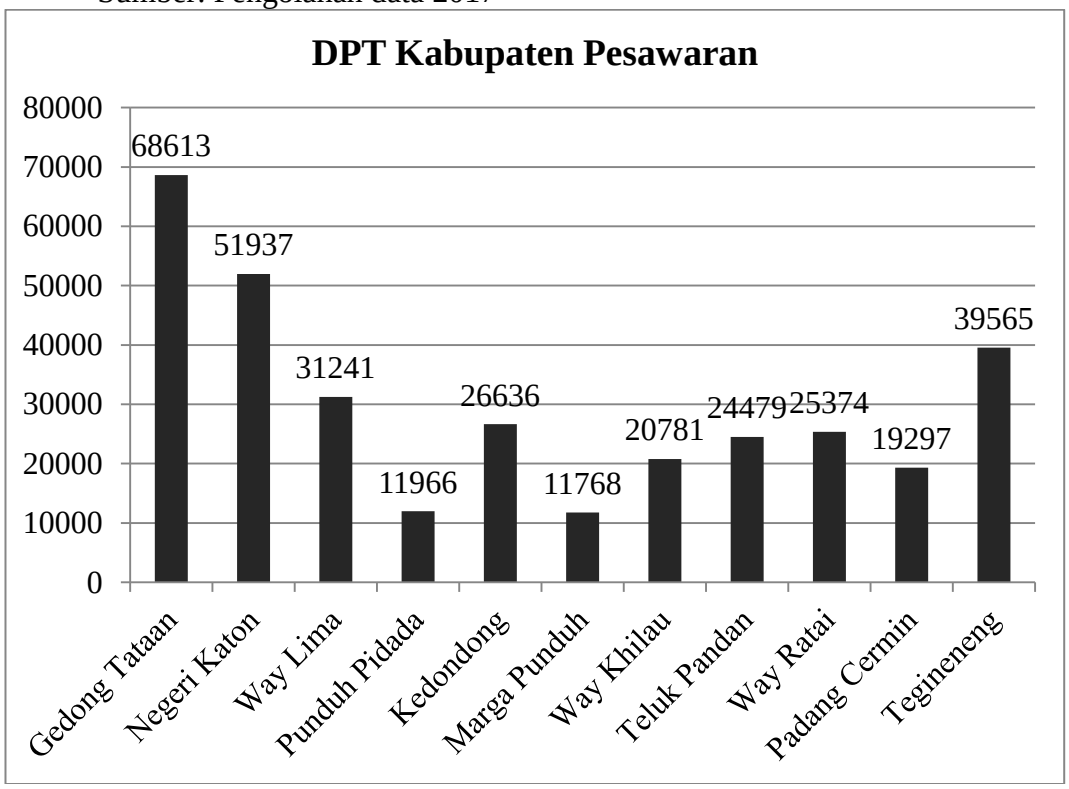

Gambar 2: Histogram DPT kabupaten Pesawaran

Pesertaan masyarakat dalam pilkada kabupaten Pesawaran tahun 2015 tertera dalam table berikut ini:

Tabel 22: Pemilihan Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2015

no	Calon	Perolehan suara	Persentase
1	Aries Sandi Darma Putra., SH MH. dan Muhamad Yunus	67800	29,48%
2	H. Okta Rijaya M., S.H dan Salamu Sodikin	14416	6,27%
3	Fdhil Hakim YHS BBA dan Zainal Abidin, S.Pt	39474	17,10%
4	H. Dendi Ramadhon K, S.T dan Eriawan, S.H	108271	47,08%

Sumber: Pengolahan data 2017

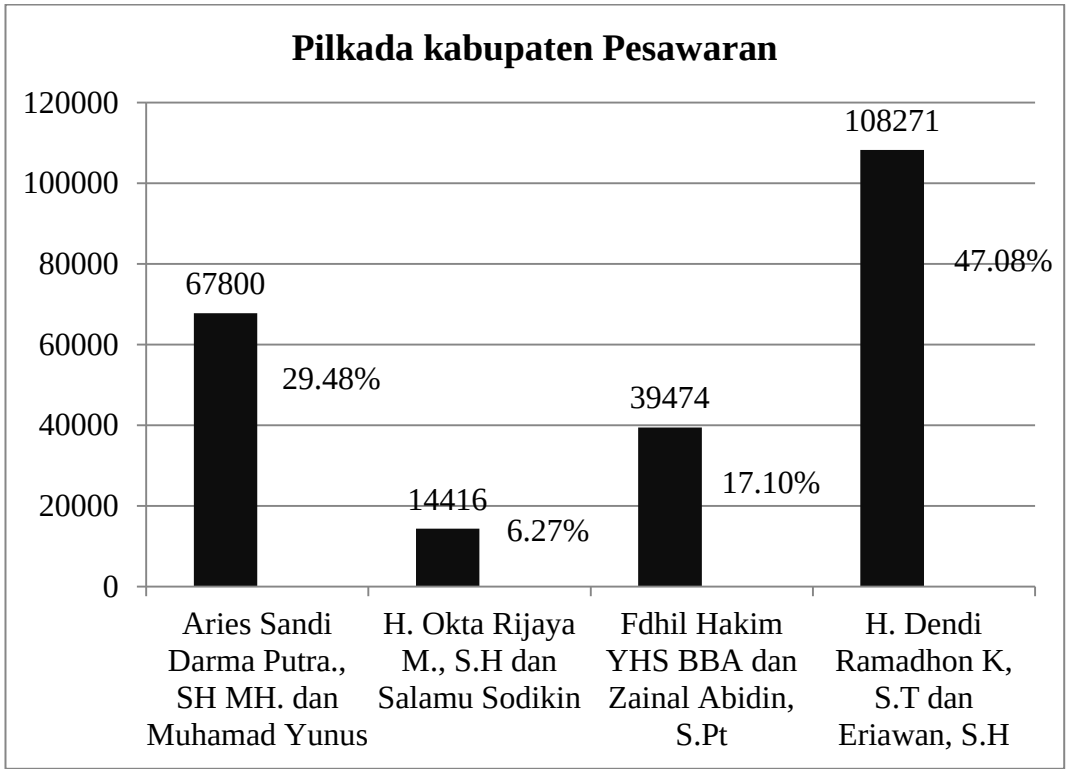

Gambar 3 Histogram Pilkada kabupaten Pesawaran

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif antara pengetahuan politik terhadap partisipasi politik, namun pengaruh positif yang diberikan kesadaran politik terhadap partisipasi politik pada Pilkades Desa Negeri Sakti, kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran berjumlah 21 % adalah kelompok yang menunjukkan tingkat kesadaran politik yang rendah karenakan faktor usia responden yang rata-rata di atas 65 tahun serta kondisi ekonomi pendidikan yang juga tergolong rendah. Kelompok kedua adalah kelompok yang memiliki kesadaran politik yang baik berkisar antara 79 %, ini termasuk kesadaran politik yang baik, pada kelompok interval ini responden yang terpilih adalah dari golongan terpelajar, siswa SMA dengan usia 18 tahun, dari golongan mahasiswa, aktivis politik atau partai, serta mereka yang bekerja di instansi baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai akses ke informasi yang lebih baik dari yang lain.

2. Terdapat pengaruh partisipasi politik pada interval nomor 1 sampai dengan nomor 4 dengan jumlah pemilih 27 terponden memberikan penilaian rendah dengan persentase sebesar 27 %, pada kelompom ini termasuk kesadaran politik yang sedang karena selain faktor pekerjaan yang tidak menetap serta kesibukan responden untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan beban ekonomi yang berat. Kelompok interval nomor 5 sampai dengan nomor 8 dengan responden sebesar 73 responden atau 73 % memberi penilaian baik dan baik sekali, kelompo ini termasuk kesadaran politik yang baik, pada kelompok interval ini responden yang terpilih adalah dari golongan terpelajar, siswa SMA dengan usia 18 tahun, dari golongan mahasiswa, aktivis politik atau partai, serta mereka yang bekerja di instansi baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai akses ke informasi yang lebih baik dari yang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan, dan implikasi tersebut maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
   a. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengisian angket variabel Partisipasi Politik, diketahui bahwa peranan masyarakat dalam alam demokrasi di desa Negeri Sakti sangat baik dengan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam persiapan pilkada dan pelaksanaan pilkada. Hal ini menunjukkan semagai masyarakat

peneliti merasa bangga akan partisipasi yang baik di desa Negeri Sakti tersebut.

b. Karena masyarakat cenderung berpartisipasi dalam bentuk aktif dalam kegiatan politik misalnya mengamati proses pengambilan suara, ikut dalam kampanye, mengawasi penghitungan suara, ataupun ikut mensosialisakan para calon. Mahasiswa perlu mencari tahu tentang bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memberikan informasi bahwa kesadaran politik dan partisipasi politik pada Pilkada di desa Negeri Sakti memberi sumbangan efektif yang diberikan dalam pengambangan pembangunan demokrasi masyarakat desa Negeri Sakti. Selain itu baik kiranya penelitian lanjutan dapat di lakukan sejauh mana kesadaran berdemokrasi dan berpilitik masyarakat desa Negeri Sakti untuk variabel penelitian yang lain yang mempunyai hubungan dan kaitannya dengan kesadaran politik dan partisipasinya dalam berpolitik di tingkat masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Rahman,.H,.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rieneka cipta. Jakarta

Harapan. Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiyanto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Damsar, 2010. *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gatara, Said. A.A & said, Dzulkiah. Moh. 2007. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka setia.

Henry Subiakto & Rachmah Ida. 2012. *Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Notoatmodjo, Soekodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rush, Michael dan Althof, Philip. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Ruslan, Utsman Abdul Muis. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia

Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: Penerbit IKIP

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: CV. Rajawali.

Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung: CV Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.